

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Tanggal : 14 Januari 2011

Subyek : Hutan

Hal : 14

Izin Baru Konversi Hutan Mulai Dihentikan

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan moratorium atau penghentian pengeluaran izin baru konversi hutan mulai diberlakukan efektif tahun ini. Moratorium itu akan diterapkan di semua wilayah Indonesia untuk hutan primer (hutan alam) dan gambut selama dua tahun mulai Januari 2011 hingga Desember 2012.

"Moratorium ini pun berlaku di Jambi, dan kami sudah menghentikan izin baru pengelolaan dan penebangan di lahan-lahan gambut serta kawasan hutan primer di Jambi," ungkap Zulkifli ketika melakukan kunjungan kerja di Jambi, kemarin. Menurut Zulkifli, moratorium selama dua tahun itu merupakan salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Norwegia yang telah disepakati dengan ditandatanganinya letter of intent (LoI) pada 26 Mei 2010.

Selain moratorium hutan primer dan gambut, LoI juga ditandai dengan peluncuran uji coba provinsi REDD plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) pertama pada Januari 2011, dan dilanjutkan uji coba REDD plus di provinsi kedua pada 2012. "Selain itu, mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar US\$200 juta hingga 2014."

Menhut berharap, dengan moratorium itu, Indonesia mampu menurunkan emisi karbon hingga 26% pada 2020. "Ini kerja sama pertama kali, dan berharap bisa jadi contoh negara-negara lain menerapkan moratorium," katanya. Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyambut positif peringatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada acara Environmental Outlook 2011, mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia yang akan meningkat sampai 70% pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu (Media Indonesia, Kamis, 13/1).

"Bagus, dengan peringatan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bisa mengantisipasi hal ini," tutur Gusti, di Jakarta, kemarin. Sebab itu, izin lingkungan akan menjadi prioritas KLH tahun ini. "Saat ini izin pembangunan harus memenuhi izin lingkungan terlebih dulu," kata Gusti. Gusti mengaku, KLH juga telah menyerahkan draf peraturan pemerintah yang mengatur izin lingkungan itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diverifikasi sebelum ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

